

Form 2.b
Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		
Sumber Data	Renstra Dinas Koperasi UMKM Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar		
Sasaran Strategis	1	Terwujudnya Koperasi yang berkualitas	
	2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang berdaya saing dan berkualitas	
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	3,05%
	2	Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	1%
	3	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	1%
Program	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM		
Tujuan, Sasaran, IKU, yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis : Meningkatkan Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar Sasaran Strategis : 1. Terwujudnya Koperasi yang berkualitas 2. Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang berdaya saing dan berkualitas IKU Strategis : 1. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 2. Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 3. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Program : 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM		
 Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar,  Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660525 199303 1 010			

Form 2.b.1
Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		
Sumber Data	Renstra Dinas Koperasi UMKM Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar		
Sasaran Strategis	1 Terwujudnya Koperasi yang berkualitas 2 Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang berdaya saing dan berkualitas		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	3,05%
	2	Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	1%
	3	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	1%
	Program 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis : Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar Sasaran Strategis : 1. Terwujudnya Koperasi yang berkualitas 2. Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang berdaya saing dan berkualitas IKU Strategis : 1. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 2. Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 3. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Program : 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM		
 Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar  Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660525 199303 1 010			

Form 2.b.2
Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		
Sumber Data	: Renstra Dinas Koperasi UMKM Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar		
Sasaran Strategis	1 Terwujudnya Koperasi yang berkualitas 2 Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang berdaya saing dan berkualitas		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	3,05%
	2	Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	1%
	3	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	1%
Program	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis : Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar Sasaran Strategis : 1. Terwujudnya Koperasi yang berkualitas 2. Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang berdaya saing dan berkualitas IKU Strategis : 1. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 2. Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 3. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Program : 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM		
 Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar  Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660525 199303 1 010			

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Sumber Data	: Renja Dinas Koperasi UMKM Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar

Program Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar (Renja tahun 2026) dan Kegiatan Utama

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Utama :

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
6. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah
9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi
	2	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi
	3	Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi	100 Orang
	4	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha
	5	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal	539 Unit Usaha
	6	Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya	70 Unit Usaha
	7	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	8	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	9	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%
	10	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%

	11	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel		
	Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri		
	Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi		
	Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya		
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal		
	Program : Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya		
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 2. Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 3. Jumlah barang milik daerah yang diadakan 4. Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Persentase barang milik daerah yang siap pakai.		
Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar  Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660525 199303 1 010			

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Sumber Data	: Renja Dinas Koperasi UMKM Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar

Program Dinas Koperasi
UMKM Kota Denpasar
(Renja tahun 2026)
dan Kegiatan Utama

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 6. Program Pengembangan UMKM
 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Utama :
1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 6. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi
	2	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi
	3	Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi	100 Orang
	4	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha
	5	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal	539 Unit Usaha
	6	Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya	70 Unit Usaha
	7	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	8	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	9	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%
	10	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	11	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%

Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel
	Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri
	Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi
	Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal
	Program : Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 2. Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 3. Jumlah barang milik daerah yang diadakan 4. Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Persentase barang milik daerah yang siap pakai.
	Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar  <u>Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19660525 199303 1 010

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai Sumber Data Tujuan Strategis	: Pemerintah Kota Denpasar : 2026 : Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029 : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah : Renja Dinas Koperasi UMKM Tahun 2026 : Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar																																				
Program Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar (Renja tahun 2026) dan Kegiatan Utama	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Utama : 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 6. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																				
Keluaran/Hasil Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Nama Keluaran/Hasil Kegiatan</th> <th style="width: 30%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel</td> <td>100 Koperasi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri</td> <td>150 Koperasi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi</td> <td>100 Orang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya</td> <td>10 Unit Usaha</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal</td> <td>539 Unit Usaha</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya</td> <td>70 Unit Usaha</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Jumlah barang milik daerah yang diadakan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Persentase barang milik daerah yang siap pakai</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target	1	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi	2	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	3	Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi	100 Orang	4	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha	5	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal	539 Unit Usaha	6	Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya	70 Unit Usaha	7	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	8	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	9	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	10	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	11	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%
No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target																																			
1	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi																																			
2	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi																																			
3	Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi	100 Orang																																			
4	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha																																			
5	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal	539 Unit Usaha																																			
6	Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya	70 Unit Usaha																																			
7	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%																																			
8	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%																																			
9	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%																																			
10	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%																																			
11	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%																																			

Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel
	Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri
	Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi
	Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal
	Program : Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 2. Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 3. Jumlah barang milik daerah yang diadakan 4. Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Persentase barang milik daerah yang siap pakai.
	Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar  Dr. Dewa Made Agung, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660525 199303 1 010

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Sumber Data	: Renja Dinas Koperasi UMKM Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar

Program Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar (Renja tahun 2026) dan Kegiatan Utama	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Utama : 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 6. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah 9. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> 10. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> 11. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
--	---

Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi
	2	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi
	3	Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi	100 Orang
	4	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha
	5	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal	539 Unit Usaha
	6	Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya	70 Unit Usaha
	7	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	8	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	9	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%
	10	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	11	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%

Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel
---	--

Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri
Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi
Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya
Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal
Program : Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 2. Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 3. Jumlah barang milik daerah yang diadakan 4. Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Persentase barang milik daerah yang siap pakai.

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



[Signature]

Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Sumber Data	: Renja Dinas Koperasi UMKM Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar

Program Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar (Renja tahun 2026) dan Kegiatan Utama	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Utama : 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 6. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
---	--

Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi
	2	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi
	3	Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi	100 Orang
	4	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra	10 Unit Usaha
	5	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal	539 Unit Usaha
	6	Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya	70 Unit Usaha
	7	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	8	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	9	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%
	10	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	11	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%

Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel
	Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri
	Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi
	Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal
	Program : Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 2. Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 3. Jumlah barang milik daerah yang diadakan 4. Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Persentase barang milik daerah yang siap pakai.
Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar  Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660525 199303 1 010	

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Sumber Data	: Renja Dinas Koperasi UMKM Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar

Program Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar (Renja tahun 2026) dan Kegiatan Utama	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Utama : 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 6. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
---	--

Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi
	2	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi
	3	Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi	100 Orang
	4	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha
	5	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal	539 Unit Usaha
	6	Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya	70 Unit Usaha
	7	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	8	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	9	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%
	10	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	11	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%

Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel
	Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri
	Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi
	Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal
	Program : Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 2. Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 3. Jumlah barang milik daerah yang diadakan 4. Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Persentase barang milik daerah yang siap pakai.
Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar  Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660525 199303 1 010	

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Sumber Data	: Renja Dinas Koperasi UMKM Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar

Program Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar (Renja tahun 2026) dan Kegiatan Utama	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 6. Program Pengembangan UMKM 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Utama : 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 6. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--

Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi
	2	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi
	3	Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi	100 Orang
	4	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha
	5	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal	539 Unit Usaha
	6	Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya	70 Unit Usaha
	7	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	8	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	9	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%
	10	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	11	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%

Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel
---	--

Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri

Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi

Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya

Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal

Program : Pengembangan UMKM
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Keluaran/Hasil Kegiatan :
1. Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu
2. Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu
3. Jumlah barang milik daerah yang diadakan
4. Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
5. Persentase barang milik daerah yang siap pakai.

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar


Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Sumber Data	: Renja Dinas Koperasi UMKM Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar

Program Dinas Koperasi
UMKM Kota Denpasar
(Renja tahun 2026)
dan Kegiatan Utama

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 6. Program Pengembangan UMKM
 - 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- Kegiatan Utama :
1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 6. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - 7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 8. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi
	2	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi
	3	Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi	100 Orang
	4	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha
	5	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal	539 Unit Usaha
	6	Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya	70 Unit Usaha
	7	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	8	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%
	9	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%
	10	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	11	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%

Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel
	Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri
	Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi
	Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Bertransformasi dari Informal ke Formal
	Program : Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 2. Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 3. Jumlah barang milik daerah yang diadakan 4. Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Persentase barang milik daerah yang siap pakai
	Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar  Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si Pemimpin Utama Muda NIP. 19660525 199303 1 010

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

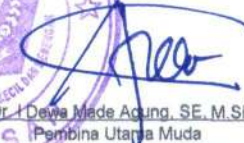
Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Nama OPD		: Dinas Koperasi UMKM								
Tahun Penilaian		: 2026								
Periode yang dinilai		: Renstra 2025 - 2029								
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan : Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar									
1	Sasaran : Terwujudnya Koperasi yang berkualitas Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Kinerja koperasi menurun disebabkan koperasi tidak membuat prosedur yang jelas	RSO.26.17.18.01	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi	Kurangnya pengetahuan dan kompetensi pengelola koperasi	Internal dan Eksternal	C dan UC	Kinerja koperasi terhambat	Dinas Koperasi UMKM, dan Anggota Koperasi
			Perbuatan curang dalam penyajian dokumen perencanaan	RF.26.17.18.01	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Bidang, PPTK dan Perencana	Adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan pada proses penyusunan perencanaan anggaran, Lemahnya SPIP, terutama pada tahap identifikasi dan validasi usulan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara Potensi mark-up pada tahap penganggaran	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
			Realisasi penerimaan barang dan jasa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (data Fiktif)	RF.26.17.18.02	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Bidang	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa Lemahnya SPIP, terutama pada tahap verifikasi	Internal	C	Adanya potensi kerugian Keuangan negara	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
	Sasaran : Terwujudnya Koperasi yang berkualitas Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	Kinerja pemeriksa koperasi terhambat disebabkan karena data yang diterima kurang lengkap	RSO.26.17.18.02	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Pengawas Koperasi	Data yang akan diperiksa kurang lengkap	Eksternal	UC	Kinerja terhambat	Dinas Koperasi UMKM
			Perbuatan curang dalam penyajian dokumen pemeriksaan kesehatan koperasi	RF.26.17.18.05	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Pengawas Koperasi	Adanya keinginan untuk mendapat hasil yang baik	Eksternal	C	Hasil pemeriksaan tidak objektif	Dinas Koperasi UMKM

Koperasi		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.06	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, PPTK dan Bendahara Pengeluaran	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
Sasaran : Terwujudnya Koperasi yang berkualitas Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan SDM Koperasi yang berkompeten	Kurangnya kompetensi SDM koperasi dalam pengelolaan koperasi	RSO.26.17.18.03	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Kepala Bidang	Tidak tercapainya target realisasi pelaksanaan diklat dan sertifikasi	Internal dan Eksternal	C dan UC	Rendahnya kompetensi pengurus dan pengelola koperasi dalam pengelolaan koperasi	Masyarakat, Dinas Koperasi UMKM, dan Negara
		Diklat perkoperasian tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan (pembelembungan anggaran diklat dalam persiapan pelaksanaan diklat	RF.26.17.18.09	Kepala Dinas Koperasi UMKM, dan Kepala Bidang	Adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan pada proses penyusunan perencanaan anggaran diklat, Lemahnya SPIP, terutama pada tahap identifikasi dan validasi usulan diklat PPTK tidak memperhatikan jadwal pengadaan, lamanya proses pemilihan penyedia, serta lamanya proses negosiasi oleh pejabat pengadaan dengan penyedia	Internal	C	Realisasi fisik dan keuangan pengadaan tidak mencapai target, Terjadi kerugian keuangan negara	Masyarakat dan Dinas Koperasi UMKM
		Pemilihan Narasumber hanya berdasarkan faktor kedekatan bukan kompetensi	RF.26.17.18.10	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Bidang	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Internal dan Eksternal	C dan UC	Adanya potensi gratifikasi dan benturan kepentingan	Masyarakat, Dinas Koperasi UMKM dan Negara
		Realisasi penerimaan barang dan jasa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (data Fiktif)	RF.26.17.18.11	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Bidang	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Internal	C	Berpotensi Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
		Persentase meningkatnya Volume Usaha Koperasi	RSO.26.17.18.04	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Kepala Bidang	Kurangnya penyusunan rencana kegiatan fasilitasi untuk koperasi	Internal	C	Menurunnya fasilitas usaha bagi koperasi	Masyarakat, Dinas Koperasi UMKM, dan Negara
Sasaran : Terwujudnya Koperasi yang berkualitas Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan / mengutamakan kepentingan kelompok/ golongan tertentu	RF.26.17.18.15	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Bidang	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Internal	C	Adanya potensi benturan kepentingan dalam pengadaan	Masyarakat, Dinas Koperasi UMKM dan Negara
		Pemilihan calon mitra koperasi karena faktor kedekatan	RF.26.17.18.16	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Bidang	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Internal	C	Adanya potensi benturan kepentingan dalam pengadaan	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
		Realisasi penerimaan barang dan jasa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (data Fiktif)	RF.26.17.18.17	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Bidang	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Internal	C	Adanya potensi kerugian Keuangan negara	Dinas Koperasi UMKM dan Negara

2	Sasaran : Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang berdaya saing dan berkualitas Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Belum Semua Usaha Mikro Terakomodir Untuk Bertransformasi Ke Informal	RSO.26.17.18.05	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Bidang PUMKM	Pelaku UMKM Takut Akan Pajak Jika Bertransformasi Ke Formal	Eksternal	UC	Banyak Usaha Mikro Yang Belum Bertransformasi Ke Formal	Pelaku Usaha Mikro
			Pelaku Usaha Mikro Tidak Mau Didata Apakah Sudah Menjadi Pelaku Usaha Formal (Pelaku Usaha Mikro memberikan Pernyataan Palsu)	RF.26.17.18.20	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Pelaku Usaha Mikro	Persyaratan Untuk Menjadi Formal Dianggap Masih Sulit Untuk Dilengkapi	Internal dan Eksternal	C dan UC	Usaha Mikro Tidak Terdata Sebagai Usaha Formal	Pelaku Usaha Mikro
			Target Pelaku Usaha Mikro Untuk Menjadi Formal Tidak Teralisasi (Pelaku Usaha Mikro memberikan pernyataan palsu)	RF.26.17.18.21	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Bidang PUMKM	Pelaku UMKM Tidak Mau Menjadi Usaha Formal	Internal dan Eksternal	C dan UC	Target Pencapaian Usaha Informal Menjadi Formal Tidak Tercapai	Dinas Koperasi UMKM
	Sasaran : Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang berdaya saing dan berkualitas Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Wirausaha	Keterbatasan partisipasi UMKM dalam program	RSO.26.17.18.06	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM serta Kepala Bidang	Kurang luasnya penyebaran informasi program	Internal	C	Rendahnya partisipasi UMKM	Dinas Koperasi UMKM
			Pelaku UMKM pemula kurang memiliki akses informasi terkait program kegiatan di Dinas karena terjadi gratifikasi	RF.26.17.18.24	Pelaku UMKM	Pelaku UMKM menganggap kegiatan di Dinas memerlukan persyaratan yang rumit	Internal dan Eksternal	C dan UC	Pelaku UMKM tidak mengikuti program di Dinas, Potensi Gratifikasi	Pelaku UMKM
			Target partisipasi peserta lambat tercapai karena PPTK memilih target peserta berdasarkan kedekatan	RF.26.17.18.25	Kepala Bidang	Informasi tidak sampai pada target yang disasar	Internal dan Eksternal	C dan UC	Target partisipasi peserta lambat tercapai Potensi Benturan Kepentingan	Dinas Koperasi UMKM

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar


Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Nama OPD	: Dinas Koperasi UMKM
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Renstra Periode 2025 - 2029
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar
Sasaran strategis OPD	: 1. Terwujudnya Koperasi yang berkualitas 2. Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang berdaya saing dan berkualitas
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

[illegible]

6	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha yang terfasilitasi pengembangan usahanya dari aspek permodalan dan omset usahanya	Pelaksanaan	Kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha mikro	ROO 26.17.18.06	Kepala Bidang	Tidak dilakukan asesmen kebutuhan awal	Eksternal	UC	Intervensi tidak efektif, indikator tidak tercapai	masyarakat, Dinas Koperasi UMKM dan pelaku UMKM
			Perencanaan	Pelaku usaha tidak mendapatkan materi sesuai kebutuhan karena benturan kepentingan	RF 26.17.18.26	Kepala Bidang	Pelaku usaha tidak berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan	Internal	C	Indikator keberhasilan kegiatan tidak tercapai Potensi terjadi benturan kepentingan	Dinas Koperasi UMKM
			Pertanggungjawaban	Target partisipasi peserta tidak tercapai akibat benturan kepentingan	RF 26.17.18.27	Kepala Bidang	Peserta yang sudah direncanakan jumlahnya tidak datang sesuai rencana	Internal dan Eksternal	C dan UC	Serapan anggaran tidak sesuai Potensi Benturan Kepentingan	Dinas Koperasi UMKM
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Pelaksanaan	Belum terlaksananya Program Urusan pemerintah Secara Maksimal dalam layanan kesekretariatan	ROO 26.17.18.07	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Sekretaris	Keterlambatan dalam penyusunan SPJ	Internal	C	Rendahnya realisasi anggaran	Diskop UMKM
			Perencanaan	Gratifikasi oleh rekanan terdahulu sehingga kembali menggunakan rekanan tersebut pada kegiatan selanjutnya	RF 26.17.18.28	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Sekretaris	Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal	UC	Mendorong praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, serta ketidakadilan kepada penyedia lain yang berpeluang menjadi rekanan Potensi Gratifikasi	Masyarakat, Diskop UMKM dan Negara
			Pertanggungjawaban	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF 26.17.18.29	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Sekretaris	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	OPD dan Negara
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Pelaksanaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO 26.17.18.08	Kasubag Keuangan dan Bendahara Gaji	Ketidaktepatan dalam melakukan perhitungan gaji dan tunjangan	Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan	Dinas Koperasi UMKM
			Perencanaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan (manipulasi kegiatan)	RF 26.17.18.30	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Koperasi UMKM
			Pertanggungjawaban	Gratifikasi dalam proses kenaikan gaji berkala	RF 26.17.18.31	Kasubag Umum dan Keuangan	Terlambatnya proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	Internal	C	Kepercayaan kepada pelaku risiko berkurang	Dinas Koperasi UMKM
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Pelaksanaan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terlambat dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan	ROO 26.17.18.09	Sekretaris, PPTK	PPTK tidak memperhatikan jadwal pengadaan, lamanya proses pemilihan penyedia, serta lamanya proses negosiasi oleh pejabat pengadaan dengan penyedia	Internal	C	Realisasi fisik dan keuangan pengadaan tidak mencapai target	Dinas Koperasi UMKM
			Perencanaan	Pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan / mengutamakan kepentingan kelompok/ golongan tertentu	RF 26.17.18.32	Sekretaris, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan PPTK	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Internal dan Eksternal	C dan UC	Adanya benturan kepentingan	Dinas Koperasi UMKM
			Pertanggungjawaban	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF 26.17.18.33	Sekretaris, PPTK dan Bendahara Pengeluaran	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Perencanaan	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah perangkat daerah tidak terakomodir secara keseluruhan	ROO 26.17.18.10	Sekretaris, Pengurus Barang	Dalam penyusunan RKBMD Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar tidak memfleksikan kondisi real kebutuhan pada Dinas	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas	Dinas Koperasi UMKM

			Pelaksanaan	Penatausahaan barang milik daerah belum tertib secara maksimal	ROO.26.17.18.11	Sekretaris, Pengurus Barang	Banyaknya jenis BMD yang terdapat pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	Internal	C	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah tidak akurat	Dinas Koperasi UMKM
			Perencanaan	Pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan / mengutamakan kepentingan kelompok/ golongan tertentu	RF.26.17.18.34	Sekretaris, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta PPTK	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Internal	C	Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
			Pertanggungjawaban	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.35	Sekretaris, PPTK dan Bendahara Pengeluaran	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan	Penyediaan dan pembayaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlambat dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan dan anggaran kas	ROO.26.17.18.12	Sekretaris, PPTK	PPTK tidak memperhatikan jadwal pengadaan, lamanya proses pemilihan penyedia, serta lamanya proses negosiasi oleh pejabat pengadaan dengan penyedia	Internal	C	Realisasi fisik dan keuangan pengadaan tidak mencapai target	Dinas Koperasi UMKM
			Perencanaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan dimana terdapat manipulasi data perencanaan	RF.26.17.18.36	Sekretaris, Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
			Pertanggungjawaban	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.37	Sekretaris, PPTK dan Bendahara Pengeluaran	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Pelaksanaan	Pekerjaan terhambat karena peralatan dan kendaraan kantor rusak/mogok	ROO.26.17.18.13	Sekretaris, Pengurus Barang dan PPTK	Pegawai tidak melaporkan kerusakan terhadap peralatan kantor yang dipakai seperti komputer dan kendaraan, serta pembawa kendaraan tidak cermat dalam memastikan kondisi kendaraan sebelum digunakan	Internal	C	Pelaksanaan pekerjaan serta pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat	Dinas Koperasi UMKM dan Masyarakat
			Perencanaan	Jumlah pemeliharaan barang tidak sesuai dengan komponen kerusakan barang	RF.26.17.18.38	Sekretaris, Pengurus Barang dan PPTK	Ketidaksesuaian pemeliharaan barang dengan kerusakan barang	Internal	C	Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan kecurangan atas aset	Dinas Koperasi UMKM dan Negara
			Pertanggungjawaban	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.39	Sekretaris, PPTK dan Bendahara Pengeluaran	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Koperasi UMKM dan Negara



Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Strategis : Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis Pemda					
1	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat	RSP.26.26.01.03	4	4	16
2	Belum optimalnya penguatan daya saing, akses pasar, dan kemitraan UMKM serta industri lokal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	RSP.26.31.01.04	4	3	12
II Risiko Fraud Pemda					
1	Kelemahan tata kelola kebijakan integrasi UMKM dan pariwisata yang membuka peluang distorsi program dan keberpihakan	RF.26.26.01.03	4	4	16
2	Terjadinya kelemahan dalam kebijakan dan tata kelola pengembangan daya saing, akses pasar, dan kemitraan UMKM serta industri lokal yang membuka peluang terjadinya distorsi program, ketidaktepatan sasaran, dan keberpihakan kepada pihak tertentu secara sistemik	RF.26.31.01.04	4	3	12
III Risiko Strategis OPD					
Nama OPD : Dinas Koperasi UMKM					
1	Kurangnya kompetensi SDM koperasi dalam pengelolaan koperasi	RSO.26.17.18.03	2	5	10
2	Belum Semua Usaha Mikro Terakomodir Untuk Bertransformasi Ke Informal	RSO.26.17.18.05	3	3	9
3	Keterbatasan partisipasi UMKM dalam program	RSO.26.17.18.06	3	3	9

4	Kinerja koperasi menurun disebabkan koperasi tidak membuat prosedur yang jelas	RSO.26.17.18.01	2	2	4
5	Kinerja pemeriksa koperasi terhambat disebabkan karena data yang diterima kurang lengkap	RSO.26.17.18.02	2	2	4
6	Tidak Meningkatnya Persentase Volume Usaha Koperasi	RSO.26.17.18.04	1	3	3
IV Risiko Operasional OPD					
Nama OPD : Dinas Koperasi UMKM					
1	Tidak terlaksananya Uji Sertifikasi SDM Koperasi dengan baik	ROO.26.17.18.03	3	5	15
2	Tidak Semua Usaha Mikro Ingin Menjadi Usaha Formal	ROO.26.17.18.05	3	3	9
3	Kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha mikro	ROO.26.17.18.06	3	3	9
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terlambat dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan	ROO.26.17.18.09	3	3	9
5	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah perangkat daerah tidak terakomodir secara keseluruhan	ROO.26.17.18.10	3	3	9
6	Penatausahaan barang milik daerah belum tertib secara maksimal	ROO.26.17.18.11	3	3	9
7	Penyediaan dan pembayaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlambat dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan dan anggaran kas	ROO.26.17.18.12	3	3	9
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.26.17.18.08	2	3	6
9	Pekerjaan terhambat karena peralatan dan kendaraan kantor rusak/mogok	ROO.26.17.18.13	2	3	6
10	Belum terlaksananya Progam Urusan pemerintah Secara Maksimal dalam layanan kesekretariatan	ROO.26.17.18.07	2	2	4
11	Tidak adanya kegiatan fasilitasi akses permodalan dan restrukturisasi usaha bagi koperasi	ROO.26.17.18.04	1	3	3
12	Kinerja pengawas koperasi terhambat karena koperasi menghindari untuk diperiksa	ROO.26.17.18.01	1	1	1

13	Terhambatnya pertumbuhan kesehatan koperasi karena tidak lengkapnya perizinan koperasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta pengendalian internal koperasi	ROO.26.17.18.02	1	1	1
V Risiko Fraud OPD					
Nama OPD : Dinas Koperasi UMKM					
1	Pemilihan Narasumber hanya berdasarkan faktor kedekatan bukan kompetensi	RF.26.17.18.10	3	5	15
2	Pemilihan fasilitator uji sertifikasi yang selalu sama	RF.26.17.18.12	3	5	15
3	Usaha Mikro Tidak Mau Didata Apakah Sudah Menjadi Pelaku Usaha Formal (Pelaku Usaha Mikro memberikan Pernyataan Palsu)	RF.26.17.18.20	3	3	9
4	Target Pelaku Usaha Mikro Untuk Menjadi Formal Tidak Teralisasi (Pelaku Usaha Mikro memberikan pernyataan palsu)	RF.26.17.18.21	3	3	9
5	Data Usaha Mikro Formal Tidak Valid karena pemberian pernyataan palsu dari pelaku usaha mikro	RF.26.17.18.22	3	3	9
6	Target Usaha Formal Tidak Terealisasi karena pemberian pernyataan palsu dari pelaku usaha mikro	RF.26.17.18.23	3	3	9
7	Pelaku UMKM pemula kurang memiliki akses informasi terkait program kegiatan di Dinas karena terjadi gratifikasi	RF.26.17.18.24	3	3	9
8	Target partisipasi peserta lambat tercapai karena PPTK memilih target peserta berdasarkan kedekatan	RF.26.17.18.25	3	3	9
9	Pelaku usaha tidak mendapatkan materi sesuai kebutuhan karena benturan kepentingan	RF.26.17.18.26	3	3	9
10	Target partisipasi peserta tidak tercapai akibat benturan kepentingan	RF.26.17.18.27	3	3	9
11	Pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan / mengutamakan kepentingan kelompok/ golongan tertentu	RF.26.17.18.15	2	4	8
12	Perbuatan curang dalam penyajian dokumen perencanaan	RF.26.17.18.01	3	2	6
13	Perbuatan curang dalam penyajian dokumen perencanaan	RF.26.17.18.03	3	2	6
14	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.04	3	2	6
15	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.06	3	2	6
16	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.08	3	2	6

17	Penyusunan Data koperasi dengan bukti data yang tidak benar	RF.26.17.18.19	2	3	6
18	Gratifikasi oleh rekanan terdahulu sehingga kembali menggunakan rekanan tersebut pada kegiatan selanjutnya	RF.26.17.18.28	2	3	6
19	Diklat perkoperasian tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan (penggelembungan anggaran diklat dalam persiapan pelaksanaan diklat	RF.26.17.18.09	1	5	5
20	Pemilihan peserta tidak sesuai dengan regulasi	RF.26.17.18.13	1	5	5
21	Hasil Uji Sertifikasi Kompetensi tidak menggambarkan hasil yang sebenarnya	RF.26.17.18.14	1	5	5
22	Realisasi penerimaan barang dan jasa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (data Fiktif)	RF.26.17.18.02	1	4	4
23	Perbuatan curang dalam penyajian dokumen pemeriksaan kesehatan koperasi	RF.26.17.18.05	2	2	4
24	Kinerja pemeriksa tidak objektif karena data yang diberikan tidak benar	RF.26.17.18.07	2	2	4
25	Realisasi penerimaan barang dan jasa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (data Fiktif)	RF.26.17.18.11	1	4	4
26	Pemilihan calon mitra koperasi karena faktor kedekatan	RF.26.17.18.16	1	4	4
27	Realisasi penerimaan barang dan jasa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (data Fiktif)	RF.26.17.18.17	1	4	4
28	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan (manipulasi kegiatan)	RF.26.17.18.30	1	4	4
29	Pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan / mengutamakan kepentingan kelompok/ golongan tertentu	RF.26.17.18.32	2	2	4
30	Pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan / mengutamakan kepentingan kelompok/ golongan tertentu	RF.26.17.18.34	2	2	4
31	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.35	2	2	4
32	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.37	2	2	4
33	Jumlah pemeliharaan barang tidak sesuai dengan komponen kerusakan barang akibat kecurangan pemeliharaan	RF.26.17.18.38	2	2	4
34	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.39	2	2	4
35	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.29	1	2	2
36	Gratifikasi dalam proses kenaikan gaji berkala	RF.26.17.18.31	2	1	2

37	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti- bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.33	1	2	2
38	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan dimana terdapat manipulasi data perencanaan	RF.26.17.18.36	1	2	2
39	Pemilihan lembaga keuangan bank dan non-bank tidak sesuai kebutuhan koperasi karena PPTK memilih lembaga keuangan sesuai kepentingan pribadi	RF.26.17.18.18	1	1	1

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010

Form 5
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2026
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No a	Risiko Prioritas b	Kode Risiko c	Skala Risiko d	Pemilik Risiko e	Penyebab f	Dampak g
I Risiko Strategis Pemda						
1	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat	RSP.26.26.01.03	16	Kepala Daerah	1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan standar usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Terbatasnya promosi dan penguatan daya tarik wisata yang berkelanjutan. 3. Keterbatasan kapasitas SDM pariwisata dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengembangan sektor pariwisata	1. Penurunan daya saing dan kualitas destinasi wisata daerah. 2. Tidak optimalnya kunjungan dan belanja wisatawan. 3. Peningkatan pendapatan masyarakat tidak tercapai secara maksimal
II Risiko Fraud Pemda						
1	Kelemahan tata kelola kebijakan integrasi UMKM dan pariwisata yang membuka peluang distorsi program dan keberpihakan	RF.26.26.01.03	16	Kepala Daerah	1. Kebijakan tidak berbasis data 2. Intervensi dan konflik kepentingan 3. Koordinasi lintas sektor lemah 4. Pengendalian dan evaluasi tidak optimal 5. Transparansi rendah	1. Integrasi UMKM tidak efektif 2. Pendapatan masyarakat tidak meningkat optimal 3. Ketimpangan ekonomi 4. Kepercayaan publik menurun
III Risiko Strategis OPD						
	Nama OPD : Dinas koperasi UMKM					
IV Risiko Operasional OPD						
	Nama OPD : Dinas koperasi UMKM					
1	Tidak terlaksananya Uji Sertifikasi SDM Koperasi dengan baik	ROO.26.17.18.03	15	Kepala Bidang	Ketidaklulusan Pengurus dan Pengelola Koperasi dalam uji kompetensi	Rendahnya kompetensi pengurus dan pengelola koperasi dalam pengelolaan koperasi

	V Risiko Fraud OPD					
	Nama OPD : Dinas koperasi UMKM					
1	Pemilihan Narasumber hanya berdasarkan faktor kedekatan bukan kompetensi	RF.26.17.18.10	15	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Bidang	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Adanya potensi gratifikasi dan benturan kepentingan
2	Pemilihan fasilitator uji sertifikasi yang selalu sama	RF.26.17.18.12	15	Kepala Bidang	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Adanya potensi benturan kepentingan dalam pengadaan


 Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Koperasi UMKM
 Kota Denpasar
 Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660525 199303 1 010

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar							
Tahun Penilaian		: 2026							
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha d							
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat	RSP.26.26.01.03	Fasilitasi promosi produk UMKM melalui event pariwisata dan dukungan pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha	Belum adanya skema kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan antara pelaku pariwisata dengan UMKM dan industri kreatif lokal	1. Melakukan pembinaan usaha pariwisata agar memenuhi standar usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mengembangkan promosi daya tarik wisata untuk mendukung optimalisasi daya dukung destinasi. 3. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dalam mendukung pariwisata berkelanjutan melalui pelatihan. 4. Memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam pengembangan sektor pariwisata melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi kinerja secara berkala	Kepala Daerah	sampai dengan Triwulan IV

II Risiko Fraud Pemda							
1	Kelemahan tata kelola kebijakan integrasi UMKM dan pariwisata yang membuka peluang distorsi program dan keberpihakan	RF.26.26.01.03	Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki berbagai program integrasi UMKM dengan sektor pariwisata, seperti fasilitasi promosi produk lokal pada event pariwisata dan pembinaan UMKM berbasis ekonomi kreatif dan budaya. Mekanisme seleksi penerima program telah diatur melalui OPD terkait dan didukung dengan pendataan UMKM. Monitoring dilakukan melalui laporan kegiatan dan evaluasi berkala, serta sebagian telah memanfaatkan platform digital daerah	Kriteria seleksi penerima manfaat belum sepenuhnya berbasis data terintegrasi dan berpotensi dipengaruhi subjektivitas. Basis data UMKM belum sepenuhnya terhubung dengan data sektor pariwisata sehingga menyulitkan evaluasi dampak program. Monitoring dan evaluasi belum menggunakan indikator outcome yang kuat (misalnya peningkatan omzet atau akses pasar)	Pengembangan sistem database UMKM terintegrasi dengan sektor pariwisata berbasis NIK/NIB untuk memastikan ketepatan sasaran. Penyusunan kriteria seleksi berbasis scoring system yang transparan dan terdigitalisasi. Penguatan monitoring berbasis outcome melalui dashboard kinerja UMKM-pariwisata. Selain itu, dilakukan kolaborasi dengan desa adat, pelaku industri pariwisata, dan platform digital untuk memperluas akses pasar serta penguatan kanal pengaduan masyarakat untuk mencegah keberpihakan	Kepala Daerah	sampai dengan Triwulan IV
III Risiko Strategis OPD							
IV Risiko Operasional OPD							
1	Tidak terlaksananya Uji Sertifikasi SDM Koperasi dengan baik	ROO.26.17.18.03	Melakukan perencanaan dan evaluasi kegiatan diklat sesuai dengan regulasi terbaru	Sebagian SDM koperasi belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai manfaat dan mekanisme uji sertifikasi, sehingga tingkat partisipasi dan kesiapan peserta masih rendah serta belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur menyebabkan kendala dalam pelaksanaan tidak terdeteksi secara dini	Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam persiapan pelaksanaan diklat setiap bulan. Menyesuaikan dengan kebutuhan Diklat kompetensi bagi koperasi dan UMKM	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Bidang	Triwulan III

V Risiko Fraud OPD							
1	Pemilihan Narasumber hanya berdasarkan faktor kedekatan bukan kompetensi	RF.26.17.18.10	Verifikasi persyaratan kualifikasi narasumber berdasarkan bukti dukung yang memadai	Tidak tersedianya standar kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman yang harus dipenuhi narasumber menyebabkan proses pemilihan bersifat subjektif	Mekanisme penunjukan narasumber berdasarkan kebutuhan materi diklat dan seleksi	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Bidang	Triwulan III
2	Pemilihan fasilitator uji sertifikasi yang selalu sama	RF.26.17.18.12	Verifikasi persyaratan kualifikasi narasumber berdasarkan bukti dukung yang memadai	Belum ditetapkan kebijakan rotasi fasilitator menyebabkan penggunaan fasilitator yang sama secara berulang tanpa mempertimbangkan penyegaran metode maupun pemerataan	Mekanisme penunjukan narasumber berdasarkan kebutuhan materi diklat dan seleksi	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Bidang	Triwulan III

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	I Risiko Strategis Pemda						
1	Melakukan pembinaan usaha pariwisata agar memenuhi standar usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sosialisasi, bimbingan teknis, surat edaran, media daring resmi Pemda	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Pelaku usaha pariwisata, pengelola DTW	sampai dengan Triwulan IV		
2	Mengembangkan promosi daya tarik wisata untuk mendukung optimalisasi daya dukung destinasi	Media promosi digital, website resmi, media sosial, forum promosi pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Pelaku usaha pariwisata, wisatawan, masyarakat	sampai dengan Triwulan IV		
3	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dalam mendukung pariwisata berkelanjutan melalui pelatihan	Pelatihan, workshop, bimtek, modul pelatihan	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Pelaku usaha pariwisata, tenaga kerja sektor pariwisata	sampai dengan Triwulan IV		
4	Menguatkan sinergi lintas perangkat daerah dalam pengembangan sektor pariwisata melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi kinerja secara berkala	Rapat koordinasi, forum evaluasi, notulen dan laporan evaluasi	Bappeda bersama perangkat daerah terkait	Dinas Pariwisata, Diskop UMKM, Disperindag, DPMPTSP	sampai dengan Triwulan IV		
	II Risiko Fraud Pemda						
1	Pengembangan database UMKM terintegrasi dengan sektor pariwisata berbasis NIK/NIB	Sistem informasi UMKM, dashboard integrasi data, SOP pendataan	Dinas Koperasi & UKM, Diskominfo, Dispar	OPD terkait, desa/kelurahan, desa adat	TW I - TW IV		
2	Penerapan seleksi UMKM berbasis scoring system yang transparan dan terdigitalisasi serta didukung kolaborasi dengan desa adat dan pelaku industri pariwisata	Aplikasi seleksi digital, juknis, sosialisasi, forum kemitraan (FGD/MoU)	Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Pariwisata	Bappeda, Inspektorat, UMKM, stakeholder pariwisata	TW I - TW IV		
3	Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis outcome serta transparansi melalui dashboard kinerja dan kanal pengaduan masyarakat	Dashboard kinerja, laporan berkala, SP4N-LAPOR! (Pro Denpasar), website pengaduan	Bappeda, Dinas Koperasi & UMKM, Diskominfo, Inspektorat	Kepala Daerah, OPD terkait, masyarakat	Triwulan III-IV (berkelanjutan)		

III Risiko Strategis OPD						
Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM						
IV Risiko Operasional OPD						
Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM						
1	Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam persiapan pelaksanaan diklat setiap bulan serta menyesuaikan dengan kebutuhan Diklat kompetensi bagi koperasi dan UMKM	Surat Undangan, Rapat Koordinasi, Berita Acara/Notulen, Formulir Identifikasi Kebutuhan Diklat	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, LSP	Pimpinan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Bidang/Unit Teknis terkait di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Fasilitator Diklat	Triwulan II-III	Triwulan II-III
V Risiko Fraud OPD						
Nama OPD: Dinas koperasi UMKM						
1	Mekanisme penunjukkan narasumber berdasarkan kebutuhan materi diklat dan seleksi	Surat Undangan, Rapat Koordinasi, Berita Acara/Notulen, Formulir Penilaian/Instrumen Seleksi Narasumber	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, LSP, Calon Narasumber	Pimpinan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Bidang/Unit Teknis terkait di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Narasumber Terpilih, Peserta Diklat	Triwulan II-III	Triwulan II-III
2	Mekanisme penunjukkan narasumber berdasarkan kebutuhan materi diklat dan seleksi	Surat Undangan, Rapat Koordinasi, Berita Acara/Notulen, Formulir Penilaian/Instrumen Seleksi Narasumber	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, LSP, Calon Narasumber	Pimpinan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Bidang/Unit Teknis terkait di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Narasumber Terpilih, Peserta Diklat	Triwulan II-III	Triwulan II-III

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian		: 2026						
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar						
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Pemda						
1	Penyusunan skema kemitraan dan integrasi rantai nilai pariwisata dengan UMKM lokal			sampai dengan Triwulan IV		
2	Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis pariwisata			sampai dengan Triwulan IV		
3	Monitoring dan evaluasi keterlibatan UMKM dalam event dan destinasi pariwisata.			sampai dengan Triwulan IV		
II Risiko Fraud Pemda						
1	Pengembangan database UMKM terintegrasi dengan sektor pariwisata berbasis NIK/NIB			sampai dengan Triwulan IV		
2	Penerapan seleksi UMKM berbasis scoring system yang transparan dan terdigitalisasi serta didukung kolaborasi dengan desa adat dan pelaku industri pariwisata			sampai dengan Triwulan IV		
3	Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis outcome serta transparansi melalui dashboard kinerja dan kanal pengaduan masyarakat			sampai dengan Triwulan IV		

III	Risiko Strategis OPD					
	Nama OPD: Dinas Koperasi UMKM					
IV	Risiko Operasional OPD					
	Nama OPD: Dinas koperasi UMKM					
1	Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam persiapan pelaksanaan diklat setiap bulan serta menyesuaikan dengan kebutuhan Diklat kompetensi bagi koperasi dan UMKM	Rapat Monitoring Berkala, Laporan Perkembangan Kegiatan, Checklist Kesiapan Pelaksanaan Diklat, Dokumentasi dan Arsip Kegiatan	Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Kepala Bidang, Tim Teknis Pelaksana Kegiatan	Triwulan II-III	Triwulan II-III	
V	Risiko Fraud OPD					
	Nama OPD: Dinas koperasi UMKM					
1	Mekanisme penunjukkan narasumber berdasarkan kebutuhan materi diklat dan seleksi	Monitoring Proses Seleksi Narasumber, Pemeriksaan Kesesuaian Kualifikasi Narasumber, Evaluasi Administrasi dan Dokumen Pendukung	Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Kepala Bidang, Tim Teknis Pelaksana Kegiatan	Triwulan II-III	Triwulan II-III	
2	Mekanisme penunjukkan narasumber berdasarkan kebutuhan materi diklat dan seleksi	Monitoring Proses Seleksi Narasumber, Pemeriksaan Kesesuaian Kualifikasi Narasumber, Evaluasi Administrasi dan Dokumen Pendukung	Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Kepala Bidang, Tim Teknis Pelaksana Kegiatan	Triwulan II-III	Triwulan II-III	

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2026								
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Koperasi Sehat, Berprestasi dan Berkualitas, Jumlah Wirausaha dan UMKM yang Berdaya Saing di Kota Denpasar								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat	RSP.26.26.01.03					Penyusunan skema kemitraan dan integrasi rantai nilai pariwisata dengan UMKM lokal	sampai dengan Triwulan IV		
							Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis pariwisata	sampai dengan Triwulan IV		
							Monitoring dan evaluasi keterlibatan UMKM dalam event dan destinasi pariwisata.	sampai dengan Triwulan IV		
II Risiko Fraud Pemda										
1	Kelemahan tata kelola kebijakan integrasi UMKM dan pariwisata yang membuka peluang distorsi program dan keberpihakan	RF.26.26.01.03					Pengembangan database UMKM terintegrasi dengan sektor pariwisata berbasis NIK/NIB	sampai dengan Triwulan IV		

							Penerapan seleksi UMKM berbasis scoring system yang transparan dan terdigitalisasi serta didukung kolaborasi dengan desa adat dan pelaku industri pariwisata	sampai dengan Triwulan IV		
							Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis outcome serta transparansi melalui dashboard kinerja dan kanal pengaduan masyarakat	sampai dengan Triwulan IV		
	III Risiko Strategis OPD									
1	Kurangnya kompetensi SDM koperasi dalam pengelolaan koperasi	RSO.26.17.18.03					- Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, asosiasi koperasi, atau pihak ketiga untuk peningkatan kompetensi - Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam persiapan pelaksanaan diklat - Menghadirkan narasumber/praktisi dalam kegiatan pembinaan	Triwulan II		
2	Belum Semua Usaha Mikro Terakomodir Untuk Bertransformasi Ke Informal	RSO.26.17.18.05					- Melakukan Sosialisasi maupun Jemput Bola Untuk Pembuatan Perijinan Bagi Usaha Mikro	Triwulan II		

3	Keterbatasan partisipasi UMKM dalam program	RSO.26.17.18.06					- Melakukan Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Maupun WA Group UMKM Serta Melakukan Audiensi Ke Desa / Kelurahan	Triwulan I-IV		
4	Kinerja koperasi menurun disebabkan koperasi tidak membuat prosedur yang jelas	RSO.26.17.18.01					Melakukan sosialisasi dan diklat kepada koperasi-koperasi di kota Denpasar untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelola koperasi	Triwulan I-IV		
5	Kinerja pemeriksa koperasi terhambat disebabkan karena data yang diterima kurang lengkap	RSO.26.17.18.02					Menyusun checklist/daftar dokumen yang wajib disampaikan oleh koperasi sebelum pemeriksaan	Triwulan II		
6	Tidak Meningkatnya Persentase Volume Usaha Koperasi	RSO.26.17.18.04					- Mendorong peningkatan kompetensi pengurus koperasi - Monitoring dan evaluasi perkembangan volume usaha secara berkala	Triwulan I-IV		
IV Risiko Operasional OPD										
1	Tidak terlaksananya Uji Sertifikasi SDM Koperasi dengan baik	ROO.26.17.18.03					Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam persiapan pelaksanaan diklat	Triwulan II-III		
2	Tidak Semua Usaha Mikro Ingin Menjadi Usaha Formal	ROO.26.17.18.05					Semakin Gencar Untuk Melakukan Jemput Bola Untuk Pembuatan Perijinan Usaha Mikro	Triwulan I-IV		

3	Kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha mikro	ROO.26.17.18.06					Survei kebutuhan peserta; penyusunan paket pendampingan sesuai jenis usaha	Triwulan I-IV		
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terlambat dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan	ROO.26.17.18.09					Melakukan koordinasi dengan PPBJ, menjadwalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta Pembantu Pengurus Barang membuat laporan persediaan secara periodik	Triwulan I-IV		
5	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah perangkat daerah tidak terakomodir secara keseluruhan	ROO.26.17.18.10					Meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi BMD ke ruangan-ruangan pada sekretariat dan bidang	Triwulan I-IV		
6	Penatausahaan barang milik daerah belum tertib secara maksimal	ROO.26.17.18.11					1. Melakukan inventarisasi barang milik daerah secara bertahap 2. Berkoordinasi dengan BPKAD terkait reklas, penghapusan dan pelelangan BMD	Triwulan I-IV		
7	Penyediaan dan pembayaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlambat dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan dan anggaran kas	ROO.26.17.18.12					Melakukan koordinasi dengan PPBJ, menjadwalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, rapat evaluasi er bulan dan triwulan	Triwulan I-IV		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.26.17.18.08					Mengecek kembali perhitungan gaji dan tunjangan untuk memastikan kebutuhan sudah terpenuhi	Triwulan I-IV		

9	Pekerjaan terhambat karena peralatan dan kendaraan kantor rusak/mogok	ROO.26.17.18.13					Melakukan koordinasi dengan PPBJ, menjadwalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta Pembantu Pengurus Barang membuat laporan persediaan secara periodik	Triwulan I-IV		
10	Belum terlaksananya Progam Urusan pemerintah Secara Maksimal dalam layanan kesekretariatan	ROO.26.17.18.07					- Melakukan penjadwalan penyerahan SPJ agar dimaksimalkan pada semester pertama - Melakukan rapat evaluasi rutin setiap bulan serta triwulan	Triwulan I-IV		
11	Tidak adanya kegiatan fasilitasi akses permodalan dan restrukturisasi usaha bagi koperasi	ROO.26.17.18.04					Koordinasi dengan Tim Perencanaan dan Anggaran Daerah	Triwulan I-IV		
12	Kinerja pengawas koperasi terhambat karena koperasi menghindar untuk diperiksa	ROO.26.17.18.01					Menjadwalkan turun ke koperasi yang memberikan data kurang lengkap	Triwulan II-IV		
13	Terhambatnya pertumbuhan kesehatan koperasi karena tidak lengkapnya perizinan koperasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta pengendalian internal koperasi	ROO.26.17.18.02					Memberikan surat teguran terhadap koperasi	Triwulan II-IV		
V Risiko Fraud OPD										
1	Pemilihan Narasumber hanya berdasarkan faktor kedekatan bukan kompetensi	RF.26.17.18.10					Mekanisme penunjukan narasumber berdasarkan kebutuhan materi diklat dan seleksi	Triwulan II-III		

2	Pemilihan fasilitator uji sertifikasi yang selalu sama	RF.26.17.18.12					Mekanisme penunjukkan narasumber berdasarkan kebutuhan materi diklat dan seleksi	Triwulan II-III		
3	Usaha Mikro Tidak Mau Didata Apakah Sudah Menjadi Pelaku Usaha Formal (Pelaku Usaha Mikro memberikan Pernyataan Palsu)	RF.26.17.18.20					Melakukan Jemput Bola Untuk Pendataan	Triwulan I-IV		
4	Target Pelaku Usaha Mikro Untuk Menjadi Formal Tidak Terealisasi (Pelaku Usaha Mikro memberikan pernyataan palsu)	RF.26.17.18.21					Terus Melakukan Pendataan Dan Jemput Bola Agar Pelaku Usaha Mikro Menjadi Usaha Formal	Triwulan I-IV		
5	Data Usaha Mikro Formal Tidak Valid karena pemberian pernyataan palsu dari pelaku usaha mikro	RF.26.17.18.22					Lebih Gencar Dengan Dinas Perijinan Untuk Jemput Bola Ke Desa / Lurah Untuk Perijinan Usaha	Triwulan I-IV		
6	Target Usaha Formal Tidak Terealisasi karena pemberian pernyataan palsu dari pelaku usaha mikro	RF.26.17.18.23					Merapikan Data Usaha Yang Sudah Memiliki Perijinan Usaha Agar Mengetahui Usaha Mikro Yang Belum Memiliki Perijinan Usaha	Triwulan I-IV		
7	Pelaku UMKM pemula kurang memiliki akses informasi terkait program kegiatan di Dinas karena terjadi gratifikasi	RF.26.17.18.24					Menyebarkan informasi dengan berkolaborasi pada media-media besar dan komunitas	Triwulan I-IV		
8	Target partisipasi peserta lambat tercapai karena PPTK memilih target peserta berdasarkan kedekatan	RF.26.17.18.25					Semakin gencar menyebarkan informasi dengan berkolaborasi pada media-media besar dan komunitas	Triwulan I-IV		

9	Pelaku usaha tidak mendapatkan materi sesuai kebutuhan karena benturan kepentingan	RF.26.17.18.26					Survei kebutuhan peserta; penyusunan paket pendampingan sesuai jenis usaha	Triwulan I-IV		
10	Target partisipasi peserta tidak tercapai akibat benturan kepentingan	RF.26.17.18.27					Survei kebutuhan peserta bersama komunitas; penyusunan paket pendampingan sesuai jenis usaha	Triwulan I-IV		
11	Pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan / mengutamakan kepentingan kelompok/ golongan tertentu	RF.26.17.18.15					Pemilihan dan verifikasi rekanan dengan seleksi internal berjenjang	Triwulan I-IV		
12	Perbuatan curang dalam penyajian dokumen perencanaan	RF.26.17.18.01					Verifikasi rencana kegiatan anggaran oleh Perencana, PPK dan PA serta Pelaksanaan desk anggaran oleh TAPD	Triwulan I-IV		
13	Perbuatan curang dalam penyajian dokumen perencanaan	RF.26.17.18.03					Verifikasi rencana kegiatan anggaran oleh Perencana, PPK dan PA serta Pelaksanaan desk anggaran oleh TAPD	Triwulan I-IV		
14	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.04					- Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing - Verifikasi bukti laporan pertanggungjawaban oleh Kasubag Keuangan dan PA	Triwulan I-IV		

15	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti- bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.06					- Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing - Verifikasi bukti laporan pertanggungjawaban oleh Kasubag Keuangan dan PA	Triwulan I-IV		
16	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti- bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.08					- Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing - Verifikasi bukti laporan pertanggungjawaban oleh Kasubag Keuangan dan PA	Triwulan I-IV		
17	Penyusunan Data koperasi dengan bukti data yang tidak benar	RF.26.17.18.19					Koordinasi dengan DPMPSTSP untuk data perizinan koperasi, penggunaan microsite dan inovasi SIWA KERTIH untuk pembinaan dan pengawasan Koperasi Merah Putih	Triwulan I-IV		
18	Gratifikasi oleh rekanan terdahulu sehingga kembali menggunakan rekanan tersebut pada kegiatan selanjutnya	RF.26.17.18.28					- Menjaga integritas dan Melaporkan kepada unit yang berwenang apabila ada gratifikasi - Sosialisasi dan edukasi terkait integritas, budaya anti- korupsi, dan pencegahan gratifikasi	Triwulan I-IV		

19	Diklat perkoperasian tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan (penggelembungan anggaran diklat dalam persiapan pelaksanaan diklat	RF.26.17.18.09					- Menjaga integritas dan Melaporkan kepada unit yang berwenang apabila ada gratifikasi - Sosialisasi dan edukasi terkait integritas, budaya anti-korupsi, dan pencegahan gratifikasi	Triwulan I-IV		
20	Pemilihan peserta tidak sesuai dengan regulasi	RF.26.17.18.13					Persiapan kegiatan dengan mengundang peserta uji sertifikasi untuk wawancara	Triwulan II		
21	Hasil Uji Sertifikasi Kompetensi tidak menggambarkan hasil yang sebenarnya	RF.26.17.18.14					Pembuatan kurikulum diklat yang baru sesuai dengan regulasi yang baru	Triwulan II		
22	Realisasi penerimaan barang dan jasa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (data Fiktif)	RF.26.17.18.02					Dokumentasi dan pencatatan penerimaan barang melalui smartphone	Triwulan I-IV		
23	Perbuatan curang dalam penyajian dokumen pemeriksaan kesehatan koperasi	RF.26.17.18.05					Melakukan crosscheck ke lapangan	Triwulan II-IV		
24	Kinerja pemeriksa tidak objektif karena data yang diberikan tidak benar	RF.26.17.18.07					Melakukan crosscheck ke lapangan	Triwulan II-IV		
25	Realisasi penerimaan barang dan jasa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (data Fiktif)	RF.26.17.18.11					Dokumentasi dan pencatatan penerimaan barang melalui smartphone	Triwulan I-IV		
26	Pemilihan calon mitra koperasi karena faktor kedekatan	RF.26.17.18.16					Melibatkan SDM Koperasi dan stakeholder terkait dalam pemilihan, penunjukan, dan pengawasan calon mitra	Triwulan I-IV		

27	Realisasi penerimaan barang dan jasa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (data Fiktif)	RF.26.17.18.17					Dokumentasi dan pencatatan penerimaan barang melalui smartphone	Triwulan I-IV		
28	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan (manipulasi kegiatan)	RF.26.17.18.30					Mengoptimalkan pengawasan berjenjang secara efektif agar terjadinya transparansi terkait dengan anggaran belanja yang dipergunakan	Triwulan I-IV		
29	Pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan / mengutamakan kepentingan kelompok/ golongan tertentu	RF.26.17.18.32					Melakukan koordinasi dengan PPBJ dan menjadwalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Triwulan I-IV		
30	Pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan / mengutamakan kepentingan kelompok/ golongan tertentu	RF.26.17.18.34					- Melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e-purchasing, - Menggunakan 2 pembanding dalam penentuan penyedia untuk proses pengadaan barang maupun jasa - Menolak gratifikasi dari rekanan terdahulu	Triwulan I-IV		
31	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.35					- Melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e-purchasing - Verifikasi bukti laporan pertanggungjawaban oleh Kasubag Keuangan dan PA	Triwulan I-IV		

32	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.37					- Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing - Verifikasi bukti laporan pertanggungjawaban oleh Kasubag Keuangan dan PA	Triwulan I-IV		
33	Jumlah pemeliharaan barang tidak sesuai dengan komponen kerusakan barang akibat kecurangan pemeliharaan	RF.26.17.18.38					- Sinkronisasi RKBMD dengan RKA - Koordinasi antara pengurus barang dengan pegawai pengguna BMD, dan pegawai pembawa kendaraan serta PPTK	Triwulan I-IV		
34	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.39					- Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing - Verifikasi bukti laporan pertanggungjawaban oleh Kasubag Keuangan dan PA	Triwulan I-IV		
35	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.29					- Mengoptimalkan pengawasan berjenjang secara efektif agar terjadinya transparansi terkait dengan anggaran belanja yang dipergunakan - Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing	Triwulan I-IV		

36	Gratifikasi dalam proses kenaikan gaji berkala	RF.26.17.18.31					Pengawasan atas kenaikan gaji berkala dilakukan berjenjang dan sosialisasi terhadap pegawai BPKAD tentang kenaikan gaji berkala	Triwulan I-IV		
37	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.17.18.33					- Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing - Verifikasi bukti laporan pertanggungjawaban oleh Kasubag Keuangan dan PA	Triwulan I-IV		
38	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan dimana terdapat manipulasi data perencanaan	RF.26.17.18.36					- Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing - Verifikasi bukti laporan pertanggungjawaban oleh Kasubag Keuangan dan PA	Triwulan I-IV		
39	Pemilihan lembaga keuangan bank dan non-bank tidak sesuai kebutuhan koperasi karena PPTK memilih lembaga keuangan sesuai kepentingan pribadi	RF.26.17.18.18					Pemilihan lembaga keuangan dari potensi yang dimiliki daerah	Triwulan I-IV		

Denpasar 31 Desember 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar


 Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660525 199303 1 010